

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, yang berarti bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kata demokrasi berasal dari dua kata Yunani, yaitu "*demos*" yang berarti rakyat, dan "*kratos*" yang berarti pemerintahan. Secara singkat, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Demokrasi sebagai sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.¹ Politik secara istilah berartikan usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita, kekuasaan atau ideologi. Dalam sistem ini, masyarakat terlibat langsung dalam pemilihan wakil-wakil mereka untuk menduduki posisi dalam pemerintahan, serta berfungsi sebagai saluran untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.²

Di dalam pelaksanaannya kedaulatan tersebut diserahkan kepada wakil-wakil rakyat. Wakil rakyat tersebut kemudian bertindak untuk mewakili sebagian besar

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Ctk. Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 61.

² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

masyarakat melalui partai politik. Partai politik sering dianggap sebagai pilar demokrasi dan bahkan dianggap sebagai salah satu infrastruktur politik, karena memiliki peran yang sangat penting sebagai penghubung antara pemerintah (*the state*) dan warganya (*the citizen*).³

Partai politik merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia dengan kesepakatan dan tujuan yang sama, yakni untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya, masyarakat, bangsa, dan negara melalui proses pemilihan umum.⁴ Partai politik berfungsi sebagai saluran untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, sekaligus sebagai wadah untuk kaderisasi dan perekrutan pemimpin, baik di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, partai politik juga berperan dalam merekrut pemimpin untuk berbagai komponen penyelenggara negara. Pentingnya pendidikan politik untuk mendorong terciptanya sistem politik yang lebih baik juga lebih transparan sebagaimana dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Dengan memahami sistem politik serta hak-hak mereka sebagai warga negara, setiap individu dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas masyarakat dan membantu mewujudkan negara yang adil serta demokratis.

³ Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, Ctk. Pertama, UB Press, Malang, 2016, hlm 11.

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik.

Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi harus ditata dan disempurnakan untuk menciptakan sistem politik yang demokratis.⁵ Penataan partai politik difokuskan pada dua hal, yaitu pertama menciptakan sikap dan perilaku yang sistematis untuk membentuk budaya politik yang mendukung demokrasi. Kedua, memaksimalkan fungsi partai politik terhadap negara dan rakyat melalui pendidikan politik.

Pendidikan politik adalah sebuah proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang berkaitan dengan politik serta pemerintahan.⁶ Tujuan utama pendidikan politik yakni untuk membantu individu menjadi warga negara yang lebih terampil dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem politik, hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat, serta cara-cara berpartisipasi aktif dalam proses politik.⁷

Pendidikan politik saat ini dinilai masih kurang karena banyaknya masyarakat yang tidak dewasa dalam mengikuti demokrasi. Peningkatan jumlah partai politik di Indonesia seharusnya memberikan manfaat bagi pemahaman masyarakat yang lebih luas mengenai kebebasan berdemokrasi. Namun faktanya, partai politik saat ini belum maksimal dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Rendahnya

⁵ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, Ctk. Pertama, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 30.

⁶ Rudy Hartono, "*Fungsi dan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Bermasyarakat*", Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2016, hlm.11.

⁷ Miriam Budiardjo, *Op. Cit*, hlm. 109.

tingkat pendidikan politik masyarakat akan berdampak pada partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusinya terhadap kebijakan pemerintah.⁸

Menjelang pemilu juga dihadapkan dengan adanya isu-isu berita bohong atau *hoax* yang menyebar luas di kalangan masyarakat, Hal ini disebabkan karena rendahnya literasi politik di masyarakat. Serta, banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa politik itu kotor, padahal sesungguhnya politik merupakan suatu strategi untuk mencapai sebuah tujuan. Jika tujuan yang ingin dicapai baik dan dilaksanakan dengan cara yang benar, maka tidak ada alasan untuk menganggap politik sebagai sesuatu yang kotor. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya, seringkali terdapat tindakan-tindakan tidak etis yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam dunia politik. Seperti *money politics*, yakni suatu upaya yang mempengaruhi pilihan pemilih dengan imbalan materi atau yang lainnya, hal ini merupakan bentuk suap yang menyebabkan beberapa tanggapan masyarakat bahwa politik merupakan suatu hal yang kotor dan mengakibatkan hilangnya nilai-nilai demokrasi dan prinsip pemilu yang jujur dan adil.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagai salah satu partai besar di Indonesia, masih belum memberikan perhatian yang cukup terhadap pengembangan pendidikan politik di kalangan masyarakat. Di Kabupaten Wonogiri, PDIP dianggap belum maksimal dalam memberikan pemahaman politik kepada warga, terlihat dari banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa politik itu kotor atau percaya bahwa

⁸ Laila Azmi, dkk, “Implementasi Pendidikan Bagi Warga Negara Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik”, Jurnal Media Ilmu, Vol. 2 No. 2, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2023, hlm. 179.

politik menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik juga menunjukkan kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai politik yang seharusnya diterapkan.

Ketua KPU Kabupaten Wonogiri, Toto Sihsetyo, menyatakan bahwa partisipasi pemilih saat Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 menunjukkan tren positif. Tingkat partisipasi pemilih di Wonogiri meningkat dari 69% (600.345 pemilih) menjadi 73% (638.142 pemilih). Namun, angka ini masih belum mencapai target partisipasi nasional pada tahun 2020 yang sebesar 77%. Sedangkan, pada tahun 2024, angka partisipasi pemilu mengalami penurunan menjadi 589.239 suara atau 69,95% dan angka golput sebanyak 253.087 suara atau 30,05% dari total 842.326 warga. Ini menunjukkan pentingnya peningkatan tingkat partisipasi publik melalui pendidikan politik.⁹ Tentunya, pendidikan politik harus terus didorong agar masyarakat memiliki kesadaran berpolitik.

Mengingat pentingnya peran partai politik, khususnya dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat, peneliti melakukan penelitian di salah satu partai, yaitu DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kabupaten Wonogiri. Dengan memiliki pemahaman politik yang baik, masyarakat mampu menilai

⁹ Solo tribunnews “Tingkat Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Menurun” <https://solo.tribunnews.com/amp/2024/12/05/tingkat-partisipasi-pemilih-pilkada-2024-di-wonogiri-turun-hanya-6995-persen> . Diakses pada 30 Oktober 2024 pada pukul 19.06 WIB.

dan memberikan masukan serta kontrol sosial atas kinerja pemerintah dan wakil-wakilnya diparlemen untuk terus bekerja sesuai dengan kehendak rakyat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa urgensi pemberian pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimanakah implementasi fungsi pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui urgensi pemberian pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Wonogiri
2. Untuk mengetahui implementasi fungsi pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Wonogiri.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1 1. Orisinalitas penelitian

Peneliti Terdahulu	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan

<p>Artis Kaligis. 2017. Penelitian Skripsi. “Pendidikan Politik Partai Golkar di Kota Tomohon”</p>	<p>Pendidikan politik Partai Golkar di Kota Tomohon efektif meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Masyarakat menjadi lebih sadar akan peran mereka sebagai warga negara dan lebih aktif dalam kegiatan politik lokal di daerah tersebut.</p>	<p>Penelitian ini sama sama fokus pada peran pendidikan politik partai politik untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, dengan tujuan memberikan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan keterlibatan aktif dalam demokrasi.</p>	<p>Penelitian Kaligis mengkaji strategi dan dampak program pendidikan politik oleh Partai Golkar. Sementara itu, penelitian penulis menganalisis fungsi dan implementasi pendidikan politik oleh DPC PDI Perjuangan dalam konteks lokal yang lebih beragam.</p>
<p>Gesit Tri Susila. 2012. Penelitian Skripsi. “Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh</p>	<p>Partai Demokrat aktif menjalankan program sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Melalui</p>	<p>Penelitian ini membahas pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, dengan fokus pada pemahaman hak-hak</p>	<p>Perbedaan Penelitian Gesit dan Penulis terletak pada fokus partai dan konteks pelaksanaan pendidikan politik. Penelitian Gesit</p>

Partai Demokrat Di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Temanggung Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik”	seminar dan pelatihan, masyarakat mendapatkan pemahaman tentang hak-hak politik dan pentingnya partisipasi aktif.	politik, proses demokrasi, dan peran partai dalam memperkuat partisipasi politik.	membahas kepatuhan regulasi oleh Partai Demokrat, sementara penulis menganalisis fungsi pendidikan politik oleh DPC PDI Perjuangan dalam konteks sosial dan lokal serta wilayah yang berbeda.
Muhammad Daffa Daud. 2019. Penelitian Skripsi. “Partai Politik Dan Pendidikan Politik Studi atas Program	Partai politik berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Program ini membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang hak-hak politik dan pentingnya peran	Penelitian ini mengeksplorasi peran partai politik dalam pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik di tingkat lokal. Program pendidikan politik partai bertujuan memberikan pemahaman tentang hak	Perbedaan utama antara penelitian ini adalah subjek partai politik dan konteks geografisnya. Penelitian Daffa membahas pendidikan politik oleh Partai Golkar di Tangerang Selatan, sementara

Pendidikan Politik Partai Golongan Karya Kota Tangerang Selatan”	aktif dalam demokrasi, sehingga memperkuat pemahaman warga dan membangun kesadaran kritis terhadap isu-isu kebijakan publik. Hasilnya, partisipasi politik masyarakat di tingkat lokal meningkat.	politik dan pentingnya keterlibatan aktif, yang mendukung demokrasi serta tata kelola pemerintahan yang lebih responsif.	Penulis meneliti peran DPC PDI Perjuangan di Wonogiri, Jawa Tengah. Pendekatan penelitian Daffa menggunakan jenis normatif, sedangkan penulis menggunakan empiris.
Rahmiyati Mii, Mohamad Reza, Firman Latuda. 2023. Artikel Jurnal. “Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik”	Pendidikan politik berdampak positif dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam politik. Pendidikan politik membangun kesadaran kritis, meningkatkan kepercayaan diri untuk menyuarakan pendapat, dan mendorong	Persamaan Penelitian ini yaitu fokus pada pendidikan politik sebagai cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Keduanya menekankan bahwa pendidikan politik memberikan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab politik, serta pentingnya keterlibatan	Perbedaan antara penelitian Mii, dkk dan penulis terletak pada pendekatan dan cakupan analisis. Penelitian Mii, dkk menggunakan jenis normatif, bersifat umum dan teoritis, membahas peningkatan partisipasi masyarakat

	partisipasi yang lebih besar. Akhirnya, ini mendukung pemerintahan yang lebih akuntabel dan representatif.	aktif dalam demokrasi serta demokrasi yang lebih sehat dan inklusif.	melalui pendidikan politik. Sementara penulis fokus pada analisis pelaksanaan pendidikan politik oleh DPC PDI Perjuangan di Kabupaten Wonogiri.
Laila azmi, Syamsul Muarif Batubara, Cerah Hati. 2023. Artikel Jurnal. “Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Meningkatkan	Pendidikan politik bertujuan meningkatkan pemahaman warga negara tentang hak dan kewajiban dalam demokrasi. Dengan pemahaman yang lebih baik, warga lebih cenderung berpartisipasi dalam kegiatan politik, seperti pemilu, mengurangi	Penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Fokusnya pada bagaimana pendidikan politik membantu warga memahami hak dan kewajiban politik, serta mendorong keterlibatan aktif dalam proses politik.	Perbedaan antara penelitian ini terletak pada cakupan dan pendekatan kajiannya. Penelitian azmi dkk membahas pendidikan politik pada skala nasional dengan pendekatan normatif. Sementara itu, penulis fokus pada studi kasus lokal di Wonogiri, menganalisis

Kesadaran Politik”	golput, dan memperkuat demokrasi.		pelaksanaan pendidikan politik oleh DPC PDI Perjuangan.
--------------------	-----------------------------------	--	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Partai Politik

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik adalah organisasi nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela dengan dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Miriam Budiardjo menyatakan bahwa partai politik adalah sebuah kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang serupa. Sementara itu, Giovanni Sartori mengartikan partai politik sebagai kelompok politik yang ikut dalam pemilihan umum dan melalui pemilihan tersebut, dapat menempatkan calon-calon mereka untuk menduduki jabatan politik. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk

memperoleh kekuasaan politik dan merebut posisi politik (biasanya) dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.¹⁰

2. Pendidikan Politik

Dalam Bab XIII pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah digariskan tujuan diwajibkannya partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat pada umumnya dan kader partai yang disiapkan menjadi calon anggota legislatif dan pengisi jabatan eksekutif pada khususnya. Pendidikan politik merupakan proses penting yang bertujuan mengajarkan masyarakat mengenai simbol-simbol, nilai-nilai, dan norma norma dalam politik demokrasi.

Menurut Kuswati, pendidikan politik adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam perkembangan politik di negara mereka. Masyarakat perlu berpartisipasi secara penuh dan menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan alat untuk menentukan, mengembangkan, atau mengkaji kebenaran pengetahuan. Proses penelitian dilakukan dengan pendekatan yang

¹⁰ Dody Nur Andriyan, "Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial Dengan Multi Partai di Indonesia", Edisi pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 85.

metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi mengacu pada cara tertentu yang digunakan, sistematis berdasarkan suatu sistem, dan konsisten tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.¹¹

Metode penelitian hukum adalah pendekatan penelitian yang sistematis. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah atau penelitian yang didasarkan pada metode tertentu, sistematis, dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum dengan cara menganalisisnya.¹² Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang bersifat sosiologis, di mana tahap awalnya mengumpulkan data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui penelitian langsung di lapangan atau dengan masyarakat. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer, sementara data sekunder yang didapat langsung dari responden untuk dijadikan data atau informasi dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti berusaha memberikan deskripsi atau gambaran mengenai Analisis Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik Masyarakat di Kabupaten Wonogiri: Studi Kasus Pendidikan Politik DPC PDI Perjuangan Wonogiri.

2. Pendekatan Penelitian

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, UI Press, Jakarta, 2014, hlm.42.

¹² Ibid.

- a) Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan, serta menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹³ Perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
 - b) Objek penelitian ini adalah Pendidikan Politik.
 - c) Subjek Penelitian adalah Partai PDI Perjuangan Wonogiri dan Masyarakat Wonogiri.
3. Lokasi Penelitian ini berada pada wilayah Kabupaten Wonogiri.
 4. Sumber Data Penelitian
 - a) Bahan Hukum Primer

Bahan primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari lapangan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Kegiatan ini dilakukan berupa wawancara untuk mendapatkan keterangan dari pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴ Oleh karena itu dalam

¹³ Utsman Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Ctk. Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm 310.

¹⁴ Soerjano Soekanto, Op. Cit, hlm 11-12.

penelitian ini, sumber data primer berupa data hasil wawancara serta observasi kepada pihak-pihak terkait yaitu Ketua DPC PDI Perjuangan Wonogiri, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Wonogiri, Pengurus DPC PDI Perjuangan Wonogiri, Anggota DPC PDI Perjuangan Wonogiri, dan salah satu masyarakat Wonogiri.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung, meliputi dokumen resmi, buku, dan laporan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan penulis untuk mendukung dan melengkapi sumber hukum primer antara lain:

1. Buku dan jurnal yang relevan dengan pendidikan politik.
2. Peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan pendidikan politik oleh partai politik, seperti: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

c) Teknik Pengumpulan Data

(1) Teknik Pengumpulan data primer melalui studi lapangan yaitu wawancara dan observasi secara langsung dengan subjek penelitian untuk mendapatkan data, fakta, pendapat yang

diperoleh dari narasumber sebagai sumber data terkait masalah yang dikaji peneliti.

- (2) Teknik Pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yaitu jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan atau dokumen resmi lainnya.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yang mencakup apa yang dinyatakan oleh informan baik secara tertulis maupun lisan, serta perilaku nyata yang diamati. Data yang terkumpul kemudian akan digabungkan dan dianalisis secara menyeluruh untuk menghasilkan kesimpulan berupa analisis hukum, yang nantinya digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Kerangka Skripsi

Sistematika penulisan hukum adalah suatu struktur yang bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang jelas tentang temuan-temuan dari suatu penelitian. Dalam penulisan hukum (skripsi), terdapat 4 bab yang mencakup seluruh hasil penelitian yang diperoleh, sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan Pustaka yang berkaitan dengan judul serta permasalahan yang diteliti dalam penelitian hukum.

Tinjauan pustaka tersebut terdiri dari Tinjauan Partai politik, Tinjauan fungsi dan Tujuan Partai Politik, Tinjauan Sejarah PDI Perjuangan, Tinjauan Pendidikan Politik yang meliputi pengertian, bentuk dan implementasi pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menyajikan hasil penelitian serta pembahasan yang terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun hasil penelitian dan pembahasan yakni ada dua poin. Pertama, urgensi pemberian pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Wonogiri meliputi tiga landasan, yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Kedua, implementasi pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Wonogiri serta tantangan atau hambatan yang dialami dalam melaksanakan pendidikan politik tersebut.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan disertai dengan saran perihal penelitian berdasarkan analisis yang diperoleh pada masa penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN